

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, UKURAN
PEMERINTAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KEMANDIRIAN DAERAH (STUDI PADA PROVINSI
DI PULAU SUMATRA TAHUN 2020 - 2023)**



Skripsi Oleh:

NABILAH MAHARANI

01031382126154

AKUNTANSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, UKURAN PEMERINTAH,
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH (STUDI
PADA PROVINSI DI PULAU SUMATRA TAHUN 2020 -2023)**

Disusun oleh:

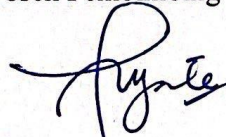
Nama : Nabilah Maharani
NIM : 01031382126154
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 14 Juli 2025



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak.,

NIP. 197212152003122001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, UKURAN
PEMERINTAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KEMANDIRIAN DAERAH (STUDI PADA PROVINSI
DI PULAU SUMATERA TAHUN 2020-2023)**

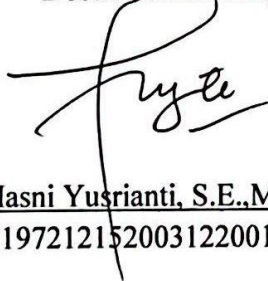
Disusun Oleh :

Nama : Nabilah Maharani
NIM : 01031382126154
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Juli 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

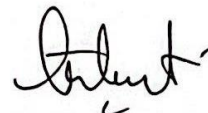
Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 23 Juli 2025

Dosen Pembimbing



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., AK., CA
NIP. 197212152003122001

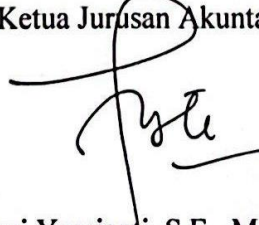
Dosen Penguji



Patmawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19871228201832001



Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nabilah Maharani
NIM : 01031382126154
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, UKURAN PEMERINTAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH (STUDI PADA PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2020-2023)

Pembimbing : Dr. Hasni Yusrianti, S.E.,M.A.A.C.,Ak.,CA
Tanggal Ujian : 22 Juli 2025

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 23 Juli 2025
Pembuat Pernyataan,



Nabilah Maharani
NIM. 01031382126154

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tuaku
- Kakak dan Adikku
- Sahabat dan Teman-Temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ” Pengaruh *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, dan belanja modal Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah (Studi pada Provinsi di pulau Sumatra tahun 2020 – 2023)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Akuntansi Sektor Publik.

Palembang, 24 Juli 2025

Penulis,



Nabilah Maharani

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada proses penyusunan skripsi ini pastinya tidak luput dari berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, penulis menyadari berkat doa, bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas seluruh nikmat kemudahan, kelancaran, dan karunia yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu **Patmawati, S.E., M.Si., Ak. CA.** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Penguji Seminar Proposal serta Ujian Komprehensif yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu **Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku dosen Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses akademik.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, khususnya **Mbak Okky** dan **Mbak Ninil** yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku, **Buya Helmi** dan **Ummi Dian** tercinta, yang menjadi sumber inspirasi dan selalu mengajarkan penulis untuk selalu kuat dan pantang menyerah. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis,
10. Kedua adikku tersayang, **Alia** dan **Ainun** yang telah menjadi teman terbaik dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ayukku tersayang, **Ayuk Deli**. Terima kasih telah senantiasa menemani penulis dan selalu siap sedia di saat penulis membutuhkan bantuan.
12. Kakak-kakakku tersayang, **Kakak Dedek**, **Mbak Intan**, **Ayuk Dhillia**, dan **Kak Gandha** yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku, **Syahra**, **Diva**, **Satria**, dan **Tomok**, Terima kasih karena selalu menemani, mendukung, dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
14. Sahabat Surga, **Neva**, **Rizka**, **Raisa**, dan **Najwa**. Terima kasih telah senantiasa menemani dan menjadi tempat berbagi berkeluh kesah penulis, Terima kasih atas seluruh cerita seru dan indah selama masa perkuliahan.

15. Teman-teman S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan kenangan indah selama penulis menempuh pendidikan.
16. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, semangat, dan doa-doa yang diberikan.

Palembang, 24 Juli 2025
Penulis,



Nabilah Maharani
NIM. 01031382126154

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Nabilah Maharani
NIM : 01031382126154
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Ukuran Pemerintah, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah (Studi pada Provinsi di Pulau Sumatra tahun 2020 - 2023)

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

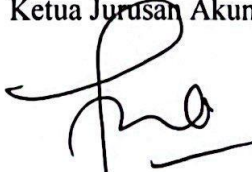
Palembang, 23 Juli 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197212152003122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197212152003122001

ABSTRAK

PENGARUH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, UKURAN PEMERINTAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH (STUDI PADA PROVINSI DI PULAU SUMATERA TAHUN 2020-2023)

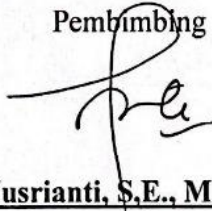
Oleh:

Nabilah Maharani

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah, dan belanja modal terhadap kemandirian daerah. Penelitian ini berfokus kepada Provinsi yang ada di pulau Sumatera selama periode 2020-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah yang tersedia di masing-masing situs resmi pemerintah daerah dan situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan alat bantu *E-Views* versi 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah. Namun, variabel ukuran pemerintah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa pentingnya pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi dan sumber daya yang dapat pendapatan asli daerah sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kata kunci: Kemandirian Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Ukuran Perusahaan, Belanja Modal

Pembimbing



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA

NIP.197212152003122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA

NIP.197212152003122001

ABSTRACT

THE EFFECT OF INTERGOVERNMENTAL REVENUE, GOVERNMENT SIZE, AND CAPITAL EXPENDITURE ON REGIONAL INDEPENDENCE (A STUDY OF PROVINCES IN THE SUMATERA REGION 2020 - 2023)

By:

Nabilah Maharani

This study aims to examine the influence of intergovernmental revenue, government size, and capital expenditure on regional autonomy. The study focuses on provinces on the island of Sumatra during the period 2020-2023. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from local government financial reports available on each local government's official website and the official website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The analysis method used is panel data regression with the E-Views version 13. The results show that intergovernmental revenue has a significant negative effect on regional autonomy. However, the variables of government size and capital expenditure do not affect regional autonomy. These findings show the importance of local governments developing their potential and resources to generate local revenue, thereby reducing their dependence on transfer funds from the central government.

Keywords: *Regional Independence, Government Size, Capital Expenditure*

Advisor



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA

NIP.197212152003122001

Acknowledged by,
Head of Accounting Department



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA

NIP.197212152003122001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Nabilah Maharani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 September 2003
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Sersan Sani, Lrg. Puncak Harapan 1. No. 1562,
Palembang
Email : nabilahmaharani@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

1. Tahun 2009 – 2015 : SD Muhammadiyah 06 Balayudha Palembang
2. Tahun 2015 – 2018 : SMP Negeri 09 Palembang
3. Tahun 2018 – 2021 : SMA Negeri 06 Palembang
4. Tahun 2021 – 2025 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Divisi Administrasi dan Kesekretariatan IMA FE UNSRI 2022
2. Anggota Divisi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(PPSDM) IMA FE UNSRI 2023
3. Staff Ahli Sekretaris Umum BEM FE UNSRI 2024

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Agensi	8
2.1.2 Kemandirian Daerah	9
2.1.3 Intergovernmental Revenue	9
2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah.....	10
2.1.5 Belanja Modal	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	12
2.3 Alur Pikir	16
2.4 Pengembangan Hipotesis	16

2.4.1 Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> Terhadap Kemandirian Daerah	16
2.4.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Daerah	17
2.4.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	20
3.2 Rancangan Penelitian	20
3.3 Jenis dan Sumber Data	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data	21
3.5 Populasi dan Sampel	21
3.5.1 Populasi.....	21
3.5.2 Sampel	21
3.6 Teknik Analisis Data	22
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	22
3.6.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel	23
3.6.3 Metode Regresi Data Panel.....	24
3.6.4 Uji Asumsi Klasik.....	25
3.6.5 Analisis Regresi Data Panel.....	26
3.6.6 Pengujian Hipotesis	27
3.7 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	29
3.7.1 Variabel Dependen	29
3.7.2 Variabel Independen	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	32
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif	33
4.1.3 Uji Pemilihan Model.....	34
4.1.4 Uji Asumsi Klasik.....	36
4.1.5 Analisis Regresi Data Panel.....	38
4.1.6 Uji Hipotesis	39
4.2 Pembahasan	41
4.2.1 Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> terhadap Kemandirian Daerah .	41
4.2.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kemandirian Daerah	43

4.2.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Keterbatasan Penelitian	48
5.3 Saran.....	48
5.4 Implikasi	49
5.4.1 Implikasi Teoritis	49
5.4.2 Implikasi Praktis	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1. Daftar Nama Provinsi Sampel Penelitian.....	22
Tabel 3.2 Ringkasan Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	31
Tabel 4.1 Daftar Nama Kabupaten/Kota Sampel Penelitian.....	32
Tabel 4.2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	33
Tabel 4.3. Hasil Uji Chow.....	34
Tabel 4.4. Hasil Uji Hausman.....	35
Tabel 4.5. Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM).....	36
Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinearitas.....	36
Tabel 4.7. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	37
Tabel 4.8. Hasil Analisis Regresi Data Panel.....	38
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	39
Tabel 4.10 Hasil Uji T.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Rasio Kemandirian Daerah Periode 2020 – 2023.....	3
Gambar 2. Alur Pikir.....	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Daerah Sampel.....	53
Lampiran 2. Hasil Tabulasi Data.....	53
Lampiran 3. Hasil Statistik Deskriptif.....	55
Lampiran 4. Hasil Uji Chow.....	56
Lampiran 5. Hasil Uji Hausman.....	56
Lampiran 6. Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM).....	56
Lampiran 7. Hasil Uji Multikolinearitas.....	57
Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	57
Lampiran 9. Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel.....	57
Lampiran 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

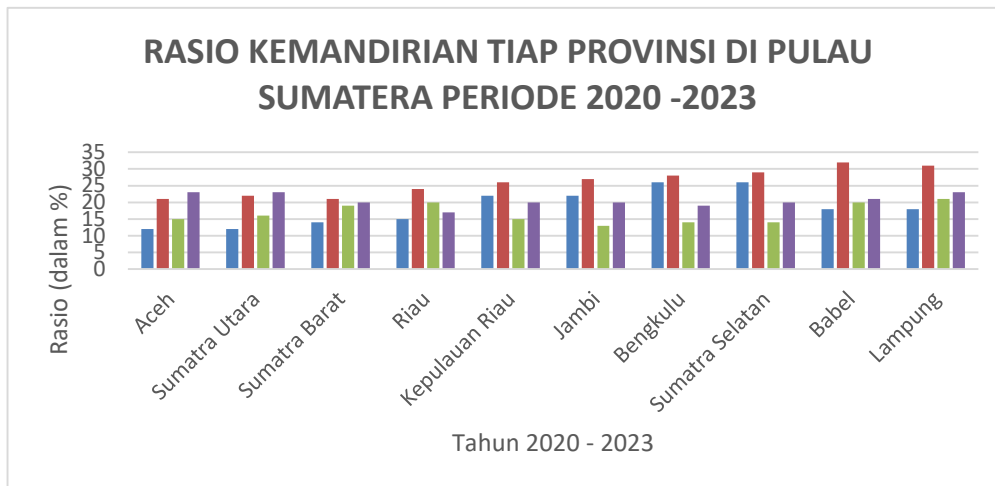
Sejak Era Reformasi, kebijakan otonomi daerah telah dilakukan sebagai salah satu langkah revolusioner dalam kebijakan desentralisasi fiskal, dimana kebijakan ini memberikan kuasa kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara lebih mandiri. Desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diatur dalam peraturan yang berlaku (Khoirunisa & Sulaeman, 2022) Selain itu, daerah otonom juga berhak untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah masing-masing untuk mengurangi rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap keuangan pemerintah pusat (Agustina et al., 2022). Salah satu langkah yang dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah adalah dengan melakukan kebijakan kemandirian daerah yang merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah diharapkan mampu membiayai kebutuhan belanja dan pembangunan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai. Kemandirian fiskal yang tinggi akan memperkuat posisi daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Namun, pada kenyataannya, sejak awal reformasi, otonomi daerah yang telah berjalan selama lebih dari 20 tahun masih menghadapi tantangan besar terkait kemandirian daerah.

Salah satu bukti nyata dari tantangan tersebut terlihat dalam kebijakan efisiensi fiskal nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), di mana pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran

sebesar Rp306,7 triliun, termasuk pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,6 triliun. Pemotongan tersebut mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang selama ini menjadi sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah (Theodora, 2025). Kebijakan ini memberikan dampak serius terhadap kemampuan fiskal daerah, terutama bagi daerah yang belum memiliki kapasitas fiskal yang memadai. Penundaan proyek infrastruktur, rendahnya penyerapan anggaran, serta melemahnya fungsi pelayanan dasar menjadi indikator nyata dari rapuhnya struktur kemandirian fiskal sebagian besar daerah di Indonesia.

Selain itu, berdasarkan data APBD yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 10 Provinsi di Sumatra selama periode 2020 – 2023 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal masih relatif rendah. Rata-rata rasio kemandirian daerah di Sumatra pada tahun 2020 hanya sebesar 18,88%, yang berarti lebih dari 80% pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pusat. Pada tahun-tahun berikutnya, rasio ini mengalami peningkatan bertahap, yakni 19,37% pada tahun 2021, 21,45% pada tahun 2022, dan mencapai 22,14% pada tahun 2023. Meskipun tren ini menunjukkan adanya perbaikan dalam hal kemandirian fiskal, angka tersebut masih berada pada kategori rendah, menandakan bahwa sebagian besar provinsi di Sumatra masih belum mampu sepenuhnya mengandalkan PAD sebagai sumber utama pendanaannya.

Gambar 1.1 Persentase Rasio Kemandirian Daerah Periode 2020 - 2023



Sumber: Laporan LRA Provinsi di Pulau Sumatra periode 2020 – 2023, 2025

Ketergantungan yang tinggi terhadap *intergovernmental revenue* dapat berdampak pada lemahnya insentif pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber daya ekonomi lokal. Jika daerah terus bergantung pada dana transfer dari pusat, maka upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah menjadi kurang prioritas. Padahal, dalam teori desentralisasi fiskal, daerah yang memiliki kemandirian tinggi akan lebih fleksibel dalam merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokalnya. Oleh karena itu, peningkatan PAD dan efisiensi belanja daerah menjadi tantangan utama dalam memperkuat otonomi fiskal di tingkat provinsi.

Terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi besaran nilai dari rasio kemandirian daerah suatu wilayah/provinsi, yang pertama, yaitu *Intergovernmental Revenue*. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada daerah dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Andriana, 2020). Penelitian (Dasmal et al., 2020) mengenai Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Temuan Audit terhadap Kinerja

Pemerintah Daerah dengan sampel seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau tahun 2014 – 2018 menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini tidak selaras dengan penelitian (Murhaban et al., 2023) mengenai Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2017-2021 dengan sampel penelitian Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2017 - 2021 menunjukkan bahwa variabel *intergovernmental revenue* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2017-2021.

Faktor kedua yang mempengaruhi kemandirian daerah adalah ukuran pemerintah. Menurut (Putri, 2020) Ketika ukuran pemerintah daerah besar, maka terdapat peluang yang lebih besar bagi daerah tersebut untuk mengimplementasikan program dan kegiatan secara lebih optimal, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Sebaliknya, ukuran pemerintah daerah yang relatif kecil dapat membatasi ruang gerak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yang pada akhirnya dapat menghambat kelancaran operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Sabono & Firmansyah, 2024) mengenai pengaruh infrastruktur dan ukuran pemerintah terhadap kemandirian daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku, bahwa tidak terdapat pengaruh ukuran pemerintah terhadap kemandirian daerah, hal tersebut menandakan bahwa manajemen aset yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota secara umum masih belum memenuhi kriteria pengelolaan yang optimal atau sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Faktor lainnya yang dapat memengaruhi tingkat kemandirian suatu daerah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal. Semakin besar proporsi belanja modal yang dialokasikan, maka semakin banyak pula program pembangunan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah, terutama dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik (Aminah et al., 2019). Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja institusi pemerintah daerah secara keseluruhan. Pernyataan ini selaras dengan pandangan (Halim, 2008) bahwa salah satu aspek penting dalam memperkuat kinerja pemerintahan adalah melalui optimalisasi alokasi belanja modal yang diarahkan pada sektor-sektor produktif dan strategis.

Penelitian (Riyadi, 2022) mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar suatu daerah dalam mengalokasikan belanja modal maka akan semakin mandiri daerah tersebut, dikarenakan semakin banyak penghasilan yang didapat dari pemanfaatan biaya modal dengan baik dan benar (Oktavia, 2021). Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian (Andriana, 2020) dan (Frijunita et al., 2024) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap belanja modal dikarenakan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pelayanan dasar seperti membangun gedung kantor dan pembelian peralatan perkantoran dibandingkan dengan membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Dengan mempertimbangkan penelitian sebelumnya, peneliti masih melihat hasil ketidakkonsistenan sehingga peneliti ingin menguji kembali **“Pengaruh *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, dan belanja modal Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah (Studi pada Provinsi di pulau Sumatra tahun 2020 – 2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kemandirian daerah?
2. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah terhadap kemandirian daerah?
3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap kemandirian daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kemandirian daerah
2. Menganalisis pengaruh ukuran pemerintah terhadap kemandirian daerah
3. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kemandirian daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang ekonomi, khususnya dalam kajian desentralisasi, kemandirian daerah, dan pengelolaan keuangan publik. Dengan menganalisis pengaruh *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah, dan

belanja modal terhadap kemandirian daerah, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman akademis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah khususnya organisasi/terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait pengelolaan keuangan dan pengembangan infrastruktur. Serta, dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai bagaimana pengelolaan keuangan daerah dan investasi dalam infrastruktur dapat mempengaruhi kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F., Pramono, A. J., & Akbar, B. (2022). *Factors Determining Low Regional Financial Independence: Financial Autonomy and Degree of Decentralization*. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), 117–130. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i1.ARTICLE>
- Aminah, I. N., Afifah, N. N., & Pratama, A. (2019). Pengaruh *Size, Wealth, Intergovernmental Revenue* dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, Dan Perpajakan)*, 3(2), 147–165.
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 105–113.
- Chan, J. L. (2003). *Public Sector Accounting*. Pearson Education.
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Al Iqtishad*, 2, 39–57.
- Efriyanto, R., Herawati, H., & Sari, N. Y. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 4(2), 121–133.
- Frijunita, S., Gurendrawati, E., & Utaminingtyas, T. H. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), *Tax Effort*, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing*, 5(2), 256–269.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Godfrey, et al. (2010). *Accounting Theory 7th Edition*. Australia: Jhon Wiley & Sons Australia Ltd.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (3rd ed.).

Penerbit Salemba Empat.

Hutagalung, I. P., & Darnius, O. (2022). Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). *FARABI: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5, 217–226.

Jensen and Meckling. 1976. *Theory of The Firm : Management Behavior, Agency Cost ad Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*. V.3, No. 4, pp. 305- 360.

Khoirunisa, I., & Sulaeman, A. S. (2022). *Fiscal Decentralization : Is There a Simultaneous Relationship Between Regional Independence and Social Welfare?* *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 213–226. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.848>

Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JISAMAR: Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2). <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>

Murhaban, N. A. A., Ikhyannuddin, & Nurhasanah. (2023). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2017-2021. *JURNAL AKUNTANSI MALIKUSSALEH*, 2(4), 577–591.

Nurhadi, D. (2019). Kemandirian Fiskal Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 11(1), 45-59.

Oktavia, C. (2021). Pengaruh PAD , *Tax Effort* , Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan

- Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *JAKSI: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 3, 298–314.
- Sabono, B. G., & Firmansyah, A. (2024). Pengaruh Infrastruktur dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8, 2677–2685.
- Sarwono, J. (2016). *Prosedur - Prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi dan Tesis dengan EViews*. Gava Media.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie, (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.
- Sihombing, Pardomuan Robinson. 2021. *Statistik Multivariat Dalam Riset*.
- Sukirno, S. (2010). *Ekonomi Publik: Teori dan Kebijakan Fiskal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yusrianti, et al. (2020). *Asset Misappropriation Tendency: Rationalization, Financial Pressure , and The Role Of Opportunity (Study In Indonesian Government Sector)*. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 373–382.
- Yusrianti, et al. (2023). *Examining Social Influence on Asset Misappropriation Tendency*. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 44, 843–854.
- Yusrianti, et al. (2016). *The Effect of Financial and Non-Financial Variables to Firm Performance: Comparison Between Indonesia and Thailand*. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 118–131.